

Terbit Online pada laman web jurnal : [jkaa.bunghatta.ac.id](http://jkaa.bunghatta.ac.id)

JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING

| ISSN (p-rit) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



## PENGARUH TRANSPARANSI KEUANGAN, AKUNTABILITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTENAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN

Indah Dialoka<sup>1\*</sup>, Lesi Hertati<sup>2</sup>, Lukita Tripermata<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri

\*Corresponding author: [indahdialokaa@gmail.com](mailto:indahdialokaa@gmail.com)

### Abstract

*This study aims to analyze the effect of financial transparency, accountability, and internal control systems on financial management performance at the Traffic Directorate of the South Sumatra Regional Police. The study employed a quantitative approach using a survey method through questionnaire distribution to respondents. The population consisted of 277 state officers assigned to various divisions and work units, with 60 respondents selected using purposive sampling techniques from the Finance Division, Planning and Administration Subdivision (Renmin), and Law Enforcement Subdirectorate (Gakkum). Data analysis was conducted using Partial Least Squares-based Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The findings indicate that financial transparency does not have a significant effect on financial management performance. In contrast, accountability and internal control systems significantly affect financial management performance. Increased accountability and the implementation of effective internal control systems are important factors in supporting more orderly, effective, and regulation-compliant financial management. This study contributes to the development of public sector financial management studies by providing empirical evidence from police institutions, which have received limited attention in previous research.*

**Keywords:** *Financial Transparency, Accountability, Internal Control System, Financial Management Performance.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi keuangan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi penelitian berjumlah 277 aparat negara yang bertugas pada berbagai bagian dan unit kerja, dengan sampel sebanyak 60 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pada Bagian Keuangan, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Renmin), serta Subdirektorat Penegakan Hukum (Gakkum). Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Sebaliknya, akuntabilitas dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Peningkatan akuntabilitas dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif menjadi faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pengelolaan keuangan sektor publik dengan menghadirkan bukti empiris pada institusi kepolisian yang masih terbatas diteliti.

**Kata Kunci:** *Transparansi Keuangan, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Pengelolaan Keuangan.*

### Informasi Artikel

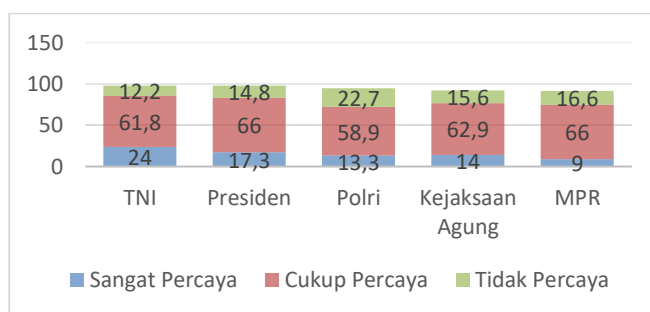
Diterima : 10/03/2026

Review Akhir : 26/05/2026

Diterbitkan online : 05/2026

## PENDAHULUAN

Meningkatnya perhatian publik terhadap kinerja keuangan pemerintah menimbulkan tuntutan agar pengelolaan anggaran dilaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab. Transparansi dalam penggunaan dana publik dipandang penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah sekaligus memastikan anggaran dimanfaatkan secara jujur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), instansi pemerintah dituntut menunjukkan pengelolaan keuangan yang jelas, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan yang tidak dilaksanakan secara transparan dan sesuai regulasi berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik serta menghambat efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan (Wonar et al., 2024).



**Gambar 1.** Survei Tingkat Kepercayaan Publik

Sumber: (Muhtadi et al., 2025)

Berdasarkan Gambar 1, survei tingkat kepercayaan publik tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri masih tergolong tinggi dibandingkan lembaga lainnya, dengan 22,7% responden menyatakan tidak percaya terhadap kinerja institusi tersebut. Persentase tersebut menjadi perhatian karena mencerminkan masih adanya penilaian negatif terhadap tata kelola dan kinerja organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik belum sepenuhnya terbentuk dan memerlukan perbaikan secara berkelanjutan, terutama pada aspek tata kelola keuangan. Pengelolaan keuangan yang belum transparan serta belum didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai berpotensi meningkatkan risiko penyimpangan, yang pada akhirnya dapat memperkuat persepsi negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menunjukkan bahwa laporan keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan disajikan secara andal. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan persediaan pada Lemdiklat, Polda, dan Rumah Sakit Bhayangkara. Permasalahan tersebut meliputi pencatatan persediaan yang belum akurat, kartu persediaan yang tidak lengkap, serta administrasi transfer barang yang belum tertib, sehingga menunjukkan perlunya penguatan sistem pengendalian internal (BPK RI, 2024). Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena pada tahun 2025 Polri mengalami kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp20,5 triliun dari total pagu awal sekitar Rp126,6 triliun sebagai bagian dari penataan belanja negara. Situasi ini menuntut pengelolaan anggaran yang lebih terencana dan diawasi secara optimal agar kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun berada dalam keterbatasan anggaran (Rahmawati, 2025).

Kinerja pengelolaan keuangan pada Polri, khususnya di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, menjadi aspek penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah karena satuan kerja ini memerlukan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran guna mendukung kegiatan operasional dan pelayanan lalu lintas. Pengelolaan keuangan yang tertib dan transparan diharapkan mampu mendukung

kelancaran program kerja sekaligus mencerminkan komitmen instansi dalam mengelola dana publik secara bertanggung jawab (Oktari et al., 2024). Namun, berdasarkan pemeriksaan awal atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2024 di Polda Sumatera Selatan, BPK RI masih menemukan beberapa kendala berupa ketidaktaatan penyusunan laporan, dokumen pertanggungjawaban, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola keuangan, termasuk di lingkungan Direktorat Lalu Lintas, masih memerlukan peningkatan kedisiplinan administrasi, kepatuhan terhadap prosedur, dan penguatan pengawasan internal (Suhcahyo, 2025).

Temuan BPK RI tersebut sejalan dengan kondisi di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan yang masih menghadapi kendala dalam konsistensi penyusunan laporan dan koordinasi antar bagian. Sistem informasi keuangan yang belum terintegrasi secara menyeluruh juga menjadi hambatan dalam proses pengawasan serta penerapan pengendalian internal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola administrasi dan penguatan pengawasan internal agar transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara lebih optimal (Halisa & Nawangsari, 2025). Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola keuangan, Polda Sumatera Selatan mengikuti Pemeriksaan Terinci Semester II Tahun 2025 guna memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih efektif dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Zulkarnain, 2025).

Penelitian terkait transparansi keuangan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan sektor publik telah banyak dilakukan pada pemerintah daerah maupun pemerintahan desa. Hasil penelitian terdahulu umumnya menunjukkan bahwa ketiga aspek tersebut berperan dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan tertib. Meskipun demikian, temuan penelitian sebelumnya belum sepenuhnya konsisten, terutama mengenai pengaruh transparansi keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan, sehingga masih diperlukan pengujian lebih lanjut pada konteks organisasi yang berbeda. Di sisi lain, penelitian mengenai pengelolaan keuangan pada institusi kepolisian masih relatif terbatas. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih berfokus pada organisasi pemerintahan yang memiliki pola birokrasi dan tingkat keterbukaan informasi yang lebih terbuka dibandingkan institusi kepolisian. Sementara itu, institusi kepolisian memiliki karakteristik organisasi yang berbeda karena menerapkan sistem komando yang bersifat hierarkis, pengawasan internal yang lebih ketat, serta pengelolaan informasi tertentu yang berkaitan dengan kepentingan operasional dan keamanan institusi. Perbedaan karakteristik tersebut memungkinkan transparansi keuangan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kinerja pengelolaan keuangan dibandingkan instansi publik lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh transparansi keuangan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya pada institusi kepolisian yang masih terbatas diteliti, serta memperluas pemahaman mengenai penerapan tata kelola keuangan pada organisasi dengan karakteristik birokrasi yang berbeda dibandingkan instansi publik lainnya

## LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

### Teori Nilai Publik (*Public Value Theory*)

*Public Value Theory* yang dikemukakan oleh Moore (1995), menekankan bahwa kinerja organisasi publik tidak hanya diukur dari efisiensi administratif, tetapi juga dari kemampuan institusi dalam menciptakan nilai publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui konsep *strategic triangle*, teori ini menjelaskan bahwa nilai publik dapat tercapai apabila organisasi mampu memenuhi tiga unsur utama, yaitu terciptanya nilai publik, adanya legitimasi dan dukungan masyarakat, serta kapasitas organisasi dalam melaksanakan kebijakan secara efektif. Dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik, transparansi keuangan berperan dalam meningkatkan keterbukaan informasi

terkait penggunaan anggaran sehingga dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab organisasi dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mampu menciptakan tata kelola yang lebih baik. Sementara itu, sistem pengendalian internal berfungsi memastikan setiap proses pengelolaan keuangan berjalan tertib, efektif, efisien, dan terhindar dari penyimpangan melalui mekanisme pengawasan yang terstruktur. Berdasarkan *Public Value Theory*, transparansi keuangan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal merupakan bagian penting dalam menciptakan nilai publik karena ketiga aspek tersebut mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, dapat dipercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Semakin baik penerapan transparansi keuangan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi publik, maka kinerja pengelolaan keuangan cenderung semakin meningkat karena organisasi mampu membangun legitimasi publik serta melaksanakan pengelolaan anggaran secara lebih optimal.

### **Pengaruh Transparansi Keuangan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan**

Berdasarkan *Public Value Theory*, transparansi keuangan mencerminkan upaya organisasi publik dalam menciptakan nilai publik melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Keterbukaan informasi tersebut memungkinkan proses pengawasan dan evaluasi penggunaan dana publik berjalan lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi institusi, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Transparansi yang diterapkan secara konsisten juga mendorong pelaksanaan anggaran menjadi lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pratiwi et al., 2024). Temuan dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi keuangan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan karena informasi yang jelas dan andal mampu mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran serta memperbaiki kualitas tata kelola organisasi. Penerapan transparansi keuangan mampu memperkuat kepercayaan terhadap proses pengelolaan dana serta meningkatkan kualitas pengendalian dalam penggunaan anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin baik transparansi keuangan yang diterapkan, maka semakin optimal pula kinerja pengelolaan keuangan organisasi. (Arnasyah et al.,2025 ; Ambarwati et al.,2025 ; Ulorlo,2025).

H<sub>1</sub> : Transparansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan**

Berdasarkan *Public Value Theory*, akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab organisasi publik dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai pemilik sumber daya publik. Penerapan akuntabilitas yang baik mendorong setiap proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan, didukung oleh bukti yang jelas, serta disertai laporan pertanggungjawaban yang dapat dipercaya. Kondisi tersebut memungkinkan penggunaan anggaran menjadi lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan tujuan organisasi sehingga mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Selain itu, akuntabilitas juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi melalui penyajian informasi keuangan dan pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Temuan dari penelitian terdahulu menunjukkan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan karena pelaksanaan anggaran yang terarah, mulai dari perencanaan hingga realisasi program, mampu meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik. Penerapan akuntabilitas yang baik mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui kejelasan tanggung jawab, ketepatan pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sehingga akuntabilitas diduga berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan (Wonar et al.,2024 ; Mattoasi & Jainuddin,2024 ; Maji et al.,2024).

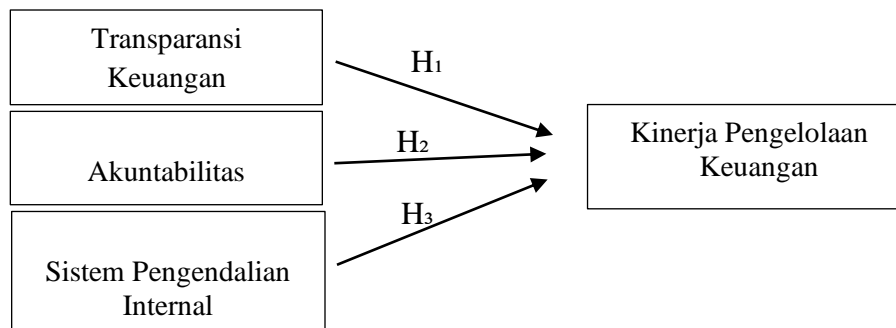
H<sub>2</sub> : Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan *Public Value Theory*, sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang berperan dalam memastikan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara tertib, sesuai ketentuan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Penerapan pengendalian internal yang baik memungkinkan setiap aktivitas keuangan diawasi secara terstruktur sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan, penyimpangan, maupun penyalahgunaan anggaran, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan dapat dipercaya. Mendukung kepatuhan terhadap peraturan, sistem pengendalian internal juga membantu organisasi menggunakan sumber daya secara lebih efektif dan efisien sehingga proses pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih optimal. Temuan penelitian terdahulu menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan karena pengawasan yang efektif mampu mendukung keteraturan pelaksanaan anggaran serta mencegah potensi kecurangan dalam pengelolaan dana publik. Sistem pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan administratif, tetapi juga menjadi instrumen organisasi dalam menciptakan nilai publik melalui pengelolaan keuangan yang lebih efektif, tertib, dan dapat dipercaya (Ulorlo,2025 ; Wonar et al.,2024 ; Maji et al.,2024).

H<sub>3</sub>: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

### Objek, Jenis dan Sumber Data

Penelitian dilaksanakan di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, sebagai objek penelitian karena memiliki aktivitas pelayanan publik yang tinggi dan memerlukan pengelolaan keuangan yang terstruktur. Jenis data menggunakan data kuantitatif melalui survei menyebarkan kuesioner kepada aparat yang berperan sebagai responden, dengan jawaban yang diukur menggunakan skala penilaian sehingga menghasilkan skor pada setiap indikator variabel. Berdasarkan sumbernya, menggunakan data primer secara langsung diperoleh dari sumber utama melalui kegiatan pengumpulan data oleh peneliti, yaitu dengan penyebaran kuesioner dan pelaksanaan observasi. Data tersebut mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan digunakan untuk mendukung analisis penelitian.

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi seluruh aparat yang bertugas pada unit kerja di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan dengan jumlah 277 aparat yang tersebar pada beberapa bagian, yaitu Bagian Keuangan, Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Renmin), Bagian Pembinaan Operasional (Binopsnal), Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Kamsel), Subdirektorat Penegakan Hukum (Gakkum), Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Regident), serta Satuan Patroli Jalan Raya (PJR).

Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023). Teknik ini digunakan karena tidak seluruh anggota populasi terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan keuangan, sehingga responden yang dipilih merupakan aparat yang memiliki tugas, tanggung jawab, serta pemahaman terkait pengelolaan keuangan pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Dengan demikian, responden yang dipilih dinilai mampu memberikan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

**Tabel 1.** Kriteria Sampel

No.	Kriteria Sampel	Jumlah
1.	Bagian Keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan.	10 Aparat Negara
2.	Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Renmin), berperan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.	30 Aparat Negara
3.	Subdit Penegakan Hukum (Gakkum), berkaitan dengan kegiatan operasional yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).	20 Aparat Negara
Total		60 Aparat Negara

Sumber: Data diolah peneliti, (2025)

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui dua metode, yaitu observasi serta penyebaran kuesioner. Observasi dilaksanakan untuk melihat secara langsung kondisi serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Selain itu, kuesioner diberikan kepada responden terpilih guna memperoleh jawaban yang mencerminkan penilaian mereka terhadap indikator setiap variabel penelitian.

### Definisi Operasional Variabel

**Tabel 2.** Definisi Operasional Variabel

No	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1.	Transparansi Keuangan ( $X_1$ ) merujuk pada tingkat keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan selama pelaksanaan kegiatan pemerintahan sebagai bentuk penerapan praktik tata kelola, pemerintahan dapat berjalan secara bertanggung jawab serta mendapatkan kepercayaan dari publik. (Melasari et al., 2022).	1. Keterbukaan 2. Aksesibilita 3. Publikasi	a. Proses keuanan terbuka b. Standar pelaporan jelas  a. Informasi keuangan mudah diperoleh b. Data keuangan tersedia  a. Pelaporan rutin b. Penyampaian informasi	Ordinal
2.	Akuntabilitas ( $X_2$ ) adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan, khususnya pelaksanaan program atau kegiatan yang dijalankan.	1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum 2. Akuntabilitas proses	a. Sesuai ketentuan yang berlaku b. Taat prosedur  a. Laporan keuangan terdokumentasi b. Bukti pertanggungjawaban	Ordinal

No	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
	(Ambarwati et al., 2025).	3. Akuntabilitas program	a. Anggaran sesuai program kerja b. Evaluasi anggaran	
3.	Sistem Pengendalian Internal ( $X_3$ ) merupakan rangkaian mekanisme yang diterapkan secara berkesinambungan oleh pimpinan dan seluruh unsur organisasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan secara optimal laporan tersaji secara andal, aset organisasi terlindungi, serta aktivitas organisasi mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. (Melasari et al., 2022).	1. Lingkungan pengendalian  2. Kegiatan pengendalian  3. Pemantauan	a. Struktur tugas jelas b. Kepatuhan prosedur  a. Prosedur transaksi b. Pengendalian dokumen  a. Pengawasan internal dilakukan rutin b. Evaluasi untuk perbaikan pengendalian	Ordinal
4.	Kinerja Pengelolaan Keuangan ( $Y$ ) menggambarkan tingkat pencapaian aparatur pengelola keuangan daerah saat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab yang menjadi amanah tercermin dari kualitas serta kuantitas hasil kerja yang dihasilkan. (Dewi et al., 2023).	1. Kualitas kerja  2. Produktivitas  3. Keandalan	a. Laporan keuangan sesuai standar b. Laporan keuangan disusun rapi  a. Anggaran digunakan sesuai rencana b. Realisasi anggaran tepat waktu  a. Informasi keuangan dapat dipercaya b. Transaksi lengkap	Ordinal

Sumber: Data diolah peneliti, (2025)

### Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan aplikasi SmartPLS versi 4.1.1.6. Penggunaan metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menganalisis hubungan antara variabel laten secara bersamaan. Selain itu, SEM-PLS dipilih karena mampu digunakan pada ukuran sampel yang relatif kecil dan tidak mensyaratkan data berdistribusi normal, sehingga sesuai digunakan dalam penelitian dengan jumlah responden sebanyak 60 orang (Hair et al., 2021). Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi dua bagian utama, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) serta pengujian model struktural (*inner model*). *Outer model* digunakan untuk menganalisis validitas dan reliabilitas indikator melalui pengujian *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, serta *Cronbach's alpha*. Sedangkan *inner model* digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar variabel laten dengan melihat nilai *R-square* ( $R^2$ ), *path coefficient*, serta nilai *t-statistic* dan *p-value* yang diperoleh dari proses *bootstrapping*. Selain itu, evaluasi model juga memperhatikan nilai *predictive relevance* ( $Q^2$ ).

Model persamaan struktural dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

- a.  $Y$  = Kinerja Pengelolaan Keuangan (variabel endogen)
- b.  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien jalur

- c.  $X_1, X_2, X_3$  = Transparansi Keuangan, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal (variabel eksogen)  
 d.  $\varepsilon$  (*epsilon*) = Error term atau residual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 3.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Rata - rata	Std. Deviasi
Transparansi Keuangan	60	19.00	30.00	25.3500	3.60708
Akuntabilitas	60	18.00	30.00	25.4667	3.98074
Sistem Pengendalian Internal	60	18.00	30.00	25.7667	2.99359
Kinerja Pengelolaan Keuangan	60	18.00	30.00	25.8667	3.51011
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Olah data dengan SPSS v.26 (2025)

Hasil tabel tersebut seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata pada kategori tinggi dengan rentang nilai minimum dan maksimum yang relatif seragam. Transparansi keuangan ( $X_1$ ) memiliki nilai rata-rata 25,35 serta standar deviasi 3,61 yang mengindikasikan bahwa aparat menilai keterbukaan informasi keuangan secara positif. Akuntabilitas ( $X_2$ ) memiliki nilai rata-rata 25,47 dengan standar deviasi 3,98 yang menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan serta disertai pertanggungjawaban yang jelas. Sistem pengendalian internal ( $X_3$ ) dengan nilai rata-rata 25,77 serta standar deviasi 2,99 yang mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan internal dalam instansi tersebut telah terlaksana secara optimal. Sementara itu, kinerja pengelolaan keuangan ( $Y$ ) memiliki nilai rata-rata terbesar yaitu 25,87 serta standar deviasi 3,51 mencerminkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan instansi berada pada kategori baik dan penilaian responden cenderung konsisten.

### Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

#### Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

**Tabel 4.** Hasil Uji Validitas Konvergen (*Loading Factor*)

Variabel	Indikator	Loading factor	Keterangan
Transparansi Keuangan ( $X_1$ )	TK1	0.754	Valid
	TK2	0.794	Valid
	TK3	0.852	Valid
	TK4	0.801	Valid
	TK5	0.895	Valid
	TK6	0.831	Valid
Akuntabilitas ( $X_2$ )	A1	0.842	Vaid
	A2	0.864	Valid
	A3	0.855	Vali
	A4	0.885	Valid
	A5	0.882	Valid
	A6	0.894	Valid
Sistem Pengendalian Internal ( $X_3$ )	SPI1	0.794	Valid
	SP12	0.723	Valid
	SPI3	0.719	Valid
	SPI4	0.729	Valid
	SPI5	0.779	Valid

Variabel	Indikator	Loading factor	Keterangan
Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	SPI6	0.826	Vaid
	KPK1	0.766	Vaid
	KPK2	0.760	Valid
	KPK3	0.822	Vali
	KPK4	0.860	Valid
	KPK5	0.826	Vaid
	KPK6	0.900	Valid

Sumber: Olah data dengan SEM-PLS v.4.1.1.6. (2025)

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, indikator yang digunakan dalam pada variabel penelitian menunjukkan nilai *loading factor* > 0,70 sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan validitas konvergen.

**Tabel 5.** Hasil Uji Validitas Konvergen Berdasarkan Nilai AVE

No.	Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Kriteria	Hasil
1.	Transparansi Keuangan (X <sub>1</sub> )	0.676	> 0,50	Valid
2.	Akuntabilitas (X <sub>2</sub> )	0.758	> 0,50	Valid
3.	Sistem Pengendalian Internal (X <sub>3</sub> )	0.582	> 0,50	Valid
4.	Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	0.679	> 0,50	Valid

Sumber: Olah data dengan SEM-PLS v.4.1.1.6. (2025)

Berdasarkan tabel 5, seluruh konstruk laten memperoleh nilai *Average Variance Extracted* (AVE) > 0,50 yaitu variabel eksogen Transparansi Keuangan (X<sub>1</sub>), Akuntabilitas (X<sub>2</sub>), dan Sistem Pengendalian Internal (X<sub>3</sub>), dengan variabel endogen yaitu Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y), sehingga indikator yang digunakan telah mampu mencerminkan secara tepat konstruk laten yang hendak diukur pada penelitian ini.

### Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

**Tabel 6.** Hasil Uji Validitas Diskriminan (Kriteria *Fornell-Larcker*)

Variabel	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	Y
Transparansi Keuangan (X <sub>1</sub> )	<b>0.822</b>			
Akuntabilitas (X <sub>2</sub> )	0.819	<b>0.871</b>		
Sistem Pengendalian Internal (X <sub>3</sub> )	0.756	0.746	<b>0.763</b>	
Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	0.772	0.814	0.742	<b>0.824</b>

Sumber: Olah data dengan SEM-PLS v.4.1.1.6. (2025)

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel, seluruh konstruk laten menunjukkan kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi. Hal tersebut terlihat dari nilai akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) pada setiap konstruk yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki kemampuan untuk membedakan dari konstruk lain dalam model penelitian, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar variabel laten.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 7.** Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability (rho_c)</i>	Hasil
1.	Transparansi Keuangan ( $X_1$ )	0.904	0.926	Reliabel
2.	Akuntabilitas ( $X_2$ )	0.936	0.949	Reliabel
3.	Sistem Pengendalian Internal ( $X_3$ )	0.855	0.893	Reliabel
4.	Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	0.905	0.927	Reliabel

Sumber: Olah data dengan SEM-PLS v.4.1.1.6. (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, mengindikasikan konstruk laten memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* serta *Composite Reliability (rho\_c)* > 0,70 sehingga dinyatakan reliabel.

## Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

**Tabel 8.** Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-square Adjusted</i>
Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	0.717	0.702

Sumber: Olah data dengan SEM-PLS v.4.1.1.6. (2025)

Nilai *R-square* pada variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan menunjukkan angka sebesar 0,717 dengan *R-square adjusted* sebesar 0,702. Hasil analisis menunjukkan bahwa model yang digunakan mampu menjelaskan variasi variabel eksogen berada dikategori kuat.

## Uji Hipotesis (*Path Coefficient*)

**Tabel 9.** Hasil Uji Hipotesis *Bootstrapping*

Variabel	Koefisien Jalur	<i>T Stat stis ( O/STDEV )</i>	<i>P Value</i>
$X_1 \rightarrow Y$	0.218	1.417	0.156
$X_2 \rightarrow Y$	0.462	2.612	0.009
$X_3 \rightarrow Y$	0.232	2.055	0.040

Sumber: Olah data dengan SEM-PLS v.4.1.1.6. (2025)

Hasil yang ditampilkan dalam tabel tersebut menggambarkan adanya hubungan antar variabel, Transparansi Keuangan ( $X_1$ ) memiliki nilai *p-value* 0,156 > 0,05 serta *t-statistic* 1,417 < 1,96 dengan koefisien jalur 0,218. Temuan mengindikasikan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) tidak diterima, sehingga transparansi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Selanjutnya, Akuntabilitas ( $X_2$ ) memiliki nilai *p-value* 0,009 < 0,05 dan *t-statistic* 2,612 > 1,96 dengan koefisien jalur 0,462. Hasil mengindikasikan hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima, artinya akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Sementara itu, Sistem Pengendalian Internal ( $X_3$ ) memiliki nilai *p-value* 0,040 < 0,05 dan *t-statistic* 2,055 > 1,96 dengan koefisien jalur 0,232. Hasil mengindikasikan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima, sehingga sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan.

## Uji Predictive Relevance ( $Q^2$ )

**Tabel 10.** Nilai *Predictive Relevance* ( $Q^2$ )

Variabel	$Q^2$ Predict
Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y)	0.670

Sumber: Olah data dengan SEM-PLS v.4.1.1.6. (2025)

Berdasarkan hasil uji *Predictive Relevance* ( $Q^2$ ) melalui metode PLS-Predict, diperoleh nilai  $Q^2$  pada variabel endogen Kinerja Pengelolaan Keuangan sebesar  $0,670 > 0$ . Nilai tersebut mengindikasikan adanya model struktural yang dibangun memiliki kemampuan prediksi yang memadai.

## Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Hasil analisis metode SEM-PLS, nilai *p-value* pengaruh Transparansi Keuangan ( $X_1$ ) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y) sebesar  $0,156 > 0,05$ , nilai *t-statistic*  $1,417 < 1,96$ . Nilai koefisien jalur sebesar  $0,218$  mengindikasikan hipotesis pertama ( $H_1$ ) tidak diterima, sehingga Transparansi Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. Meskipun keterbukaan keuangan telah dilaksanakan, analisis memperlihatkan bahwa langkah tersebut belum mampu memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan secara langsung. Transparansi keuangan yang dimaksud dalam hal keterbukaan informasi, proses penyusunan, kebijakan keuangan dan pelaksanaan dana publik.

Pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, transparansi keuangan yang dilakukan aparat lebih ditunjukkan melalui pelaporan yang dilakukan secara rutin dan berkala serta penyampaian informasi keuangan secara tepat kepada pihak internal. Namun, keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan, kejelasan standar pelaporan, kemudahan akses informasi, serta ketersediaan data keuangan secara lengkap belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi masih bersifat administratif dan terbatas pada kebutuhan internal, sehingga pemanfaatannya belum maksimal dalam mendukung peningkatan kinerja pengelolaan keuangan pada instansi tersebut.

Dalam *Public Value Theory*, transparansi keuangan dipandang sebagai upaya menciptakan nilai publik melalui keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Transparansi yang baik memungkinkan keterbukaan keuangan yang lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, mencegah penyimpangan, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan. Namun, temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberadaan transparansi keuangan tidak menjadi peran yang menentukan dalam mendorong kinerja pengelolaan keuangan.

Hasil analisis penelitian diperkuat temuan Oktari et al., (2024), yang menunjukkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan keterbukaan informasi yang diterapkan belum mampu secara langsung meningkatkan kinerja keuangan, karena peningkatan kinerja juga memerlukan dukungan faktor lain seperti pengelolaan anggaran yang tertata, kompetensi aparatur, dan pengawasan yang efektif. Sementara itu, temuan ini tidak sejalan dengan temuan Arnasyah et al., (2025), yang mengindikasikan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan anggaran, karena penyediaan informasi anggaran secara transparan dapat mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, memperkuat pengawasan, serta mendorong penggunaan dana yang lebih bertanggungjawab.

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Hasil analisis metode SEM-PLS, nilai *p-value* pengaruh Akuntabilitas. ( $X_2$ ) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y) sebesar  $0,009 < 0,05$ , dengan nilai *t-statistic* sebesar  $2,612 > 1,96$ . Selain itu, nilai koefisien jalur sebesar  $0,462$  menunjukkan arah dan besarnya pengaruh positif yang diberikan. Dengan hasil tersebut, hipotesis kedua ( $H_2$ ) dinyatakan diterima, hal ini berarti Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. Hasil mengindikasikan bahwa

meningkatnya tanggung jawab cenderung diikuti oleh perbaikan dalam kinerja pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut terjadi karena setiap penggunaan anggaran dilaksanakan secara transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas serta terukur.

Akuntabilitas mendorong aparat di Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan melaksanakan pengelolaan keuangan secara patuh terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjalankan setiap prosedur keuangan dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab ditunjukkan melalui dari penyusunan laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik dan setiap kegiatan keuangan yang disertai dengan bukti pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, penggunaan anggaran telah disesuaikan dengan program kerja yang ditetapkan dan didukung oleh evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara rutin serta ditindaklanjuti untuk perbaikan. Kondisi tersebut berperan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi.

Pada *Public Value Theory*, akuntabilitas berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang bertanggung jawab. Melalui akuntabilitas, setiap penggunaan anggaran harus dapat dijelaskan secara transparan, disertai bukti yang memadai, serta diterapkan berdasarkan regulasi dan pedoman operasional yang berlaku di instansi. Selain itu, akuntabilitas mendorong aparat untuk mengelola keuangan secara disiplin dan berorientasi pada kepentingan publik, sehingga kinerja pengelolaan keuangan dapat meningkat. Dengan demikian, penerapan akuntabilitas yang semakin kuat akan berkontribusi terhadap perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, karena setiap kebijakan dan keputusan keuangan diarahkan pada pencapaian tujuan serta nilai publik.

Temuan yang diperoleh menunjukkan hasil yang serupa dengan Wonar et al., (2024), yang menunjukkan akuntabilitas penting dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan keuangan. Penerapan akuntabilitas mendorong aparatur mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih tepat sasaran. Temuan ini juga diperkuat Maji et al., (2024), menunjukkan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan karena mencakup proses perencanaan, pencatatan, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan teman Ambarwati et al., (2025), yang menemukan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan, akibat penerapannya yang masih bersifat administratif serta keterbatasan pemahaman aparatur dan lemahnya pengawasan internal.

## **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan**

Hasil analisis metode SEM-PLS, nilai *p-value* pengaruh Sistem Pengendalian Internal ( $X_3$ ) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan ( $Y$ ) sebesar  $0,040 < 0,05$ , dengan nilai *t-statistic* sebesar  $2,055 > 1,96$ . Nilai koefisien jalur sebesar  $0,232$  mengindikasikan adanya hubungan yang searah antara variabel yang diuji. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis ketiga ( $H_3$ ) dinyatakan diterima. Artinya, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan. Temuan mencerminkan bahwa penerapan pengendalian internal yang optimal mampu menjaga proses pengelolaan keuangan tetap berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kinerja dalam pengelolaan keuangan.

Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menerapkan sistem pengendalian internal melalui penetapan peran serta tanggung jawab yang terstruktur dengan baik sehingga aparat memahami perannya dalam proses pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan sehari-hari, aparat bekerja dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, melaksanakan setiap transaksi sesuai ketentuan, serta mengelola dan menyimpan dokumen keuangan secara tertib sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Selain itu, pengawasan internal dilakukan secara rutin oleh aparat yang berwenang dan disertai evaluasi berkala untuk memperbaiki kekurangan yang masih ditemukan. Penerapan tersebut menjadikan proses kerja lebih teratur, meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan, serta meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pada instansi.

Berdasarkan *Public Value Theory* yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan publik harus berorientasi untuk menciptakan nilai bagi masyarakat melalui penggunaan anggaran yang tertib dan

sesuai kepentingan publik. Dalam konteks ini, sistem pengendalian internal berperan sebagai pedoman bagi aparat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan pengawasan internal yang optimal mendorong aparat bekerja lebih terarah dan berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan keuangan. Sistem pengendalian internal berkontribusi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan karena aparat lebih fokus pada kepatuhan terhadap aturan dan pemenuhan kepentingan publik.

Temuan penelitian diperkuat dengan Ulorlo (2025), yang mengindikasikan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan karena membantu aparatur mengelola anggaran secara lebih terarah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Temuan juga menunjukkan hasil yang serupa dengan Wonar et al., (2024), yang menegaskan bahwa pengendalian internal berperan penting dalam menjamin keandalan laporan keuangan, kesesuaian terhadap regulasi, serta efektivitas pengelolaan keuangan. Namun, temuan ini tidak sejalan dengan temuan Fitri & Arza, (2023), yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan akibat penerapannya yang belum optimal dan rendahnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengendalian internal.

## SIMPULAN

Hasil analisis data serta pembahasan mengenai mengenai pengaruh transparansi keuangan, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, diperoleh beberapa kesimpulan. Transparansi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan sehingga hipotesis pertama tidak diterima, karena penerapannya masih bersifat administratif dan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan maka hipotesis kedua diterima, yang menunjukkan bahwa kejelasan tanggung jawab, kelengkapan pertanggungjawaban, serta evaluasi anggaran mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan sehingga hipotesis ketiga diterima, karena penerapan pengendalian internal membantu memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan tertib, sesuai prosedur, serta meminimalkan kesalahan dan penyimpangan.

Secara teoritis, penelitian ini mendukung *Public Value Theory* yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan sektor publik yang didukung oleh akuntabilitas dan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan kualitas tata kelola serta menciptakan nilai publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih tertib dan dapat dipercaya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa transparansi keuangan pada institusi kepolisian belum tentu memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja pengelolaan keuangan karena adanya karakteristik organisasi yang berbeda dibandingkan instansi publik lainnya. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan dalam memperkuat akuntabilitas dan pengawasan internal guna mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, tertib, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## KETERBATASAN DAN SARAN

Ruang lingkup terbatas pada satu instansi, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, sehingga temuan yang diperoleh belum tentu dapat diterapkan secara umum pada instansi pemerintah lain yang memiliki karakteristik organisasi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada unit kerja yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh kondisi pengelolaan keuangan pada seluruh unit yang ada di instansi tersebut.

1. Bagi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal diterapkan secara konsisten dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Upaya tersebut dapat didukung melalui penguatan pengawasan internal, kejelasan pembagian tanggung jawab,

serta keterbukaan informasi keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing unit kerja sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian dengan memasukkan variabel tambahan yang berpotensi memiliki pengaruh terhadap variabel yang diteliti, seperti kompetensi aparat, partisipasi masyarakat, dan budaya organisasi. Selain itu, objek penelitian dapat diperluas pada instansi pemerintah lain, misalnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Palembang atau unit kerja lain di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada pimpinan Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan atas izin dan kesempatan yang diberikan pada proses penelitian. Penulis juga mengapresiasi kesediaan para aparat dan pihak terkait yang telah meluangkan waktu untuk menjadi responden serta memberikan data yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengumpulan data penelitian. Kontribusi dan kerja sama tersebut membantu peneliti menyelesaikan penelitian secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A. P., Linawati, & Kurniawan, A. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi, Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Rowomarto Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Akuntansi)*, 5(2), 533–547.
- Arnasyah, I. D., Tambunan, K., & Nasution, Y. S. J. (2025). The Influence of Accountability, Transparency, and Internal Control on the Budget Implementation Performance of the Binjai City Regional Government. *Journal of Applied Business Administration*, 9(2). <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JABA/article/view/10654/3017>
- Dewi, M., Sumiati, N., & Suryaman, W. (2023). Pengaruh Implementasi SIPD Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2), 621–624. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4500>
- Fitri, R. A., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Nagari: Studi Empiris pada Nagari di Kota Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1115–1126. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.824>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_7)
- Halisa, N., & Nawangsari, A. T. (2025). Analisis Praktik Transparansi dan Akuntabilitas pada Operasional Bidang Keuangan Polda XYZ. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(3), 330–342. <https://journalshub.org/index.php/jebaku/article/view/5945>
- Maji, R., Zakaria, Pasolo, F., Yamin Noch, M., & Sonjaya, Y. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Keerom. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 53–68. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/seiko/article/view/6289>
- Mattoasi, & Jainuddin, S. (2024). Pengaruh Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kota Tidore Kepulauan ). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 3(2), 101–112. <https://doi.org/10.31289/jbi.v3i2.5394>
- Melasari, R., Rosaliana, & Silvionita, P. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas dan

- Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Pada Opd Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 106–118. <https://doi.org/10.32520/jak.v11i2.2263>
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Governance*. Harvard University Press.
- Muhtadi, B., Ahmad, S., & Simanjuntak, B. (2025). *Rilis Temuan Survei Nasional Indikator Politik Indonesia 27 Mei 2025: Tingkat Kepercayaan Publik atas Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pemberantasan Korupsi*. Indikator.
- Nabila, P., & Maulina, I. (2025). Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 5(1), 1–11. <https://journal.unita.ac.id/index.php/jamanta/article/view/1517/805>
- Okhari, A., Solikhin, A., & Dahmiri. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Dengan Kompetensi Pegawai Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 859–872. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.32381>
- Pratiwi, R. I., Haliah, & Kusumawati, A. (2024). The Influence of Transparency, Governance, and Financial Accountability in Managing Financial Reporting in the Public Sector. *International Journal of Educational and Life Sciences*, 2(10), 1165–1180. <https://doi.org/10.59890/ijels.v2i10.2571>
- Rahmawati, D. (2025). *Polri Nyatakan Kena Efisiensi Anggaran Rp 20,5 Triliun*. DetikNews.
- RI, B. (2024). *Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 Telah Disajikan Secara Wajar dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*. BPK RI.
- Sari, M., Romli, H., & Hertati, L. (2025). The Effect of Internal Control System, Corporate Social Responsibility, and Resource Use Efficiency on Sustainability Performance: Empirical Study on Food and Beverage Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Golden Ratio of Finance Management*, 5(2), 333–344. <https://doi.org/10.52970/grfm.v5i2.1160>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Vol. 17).
- Suhcahyo, T. (2025). *BPK RI Lakukan Taklimat Awal Atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran 2024 di Polda Sumsel*. Tribata News Sumsel. <https://tribatanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/6065/BPK-RI-Lakukan-Taklimat-Awal-atas-Laporan-Keuangan-Polri-Tahun-Anggaran-2024-di-Polda-Sumsel?>
- Tetra, A., Tripermata, L., & Pebriani, R. A. (2024). Pengaruh Pengendalian Internal dan Pengelolaan Persediaan Bahan Bakar Minyak Terhadap Prosedur Penjualan Pada PT. Pertamina Ef Asset 2 Field Adera Desa Pengabuan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 3248–3254.
- Ulorlo, G. (2025). Analisis Pengaruh Pengendalian Intern, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pada BPKAD Kota Malang. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 4(4), 881–886. <https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/9439/7412>
- Wonar, K., Masdianah, Siahay, A. Z. ., Pangayow, B. J. C., Salle, H. T., & Bleskadit, N. H. (2024). The Effect Of Transparency, Accountability, And The Concept Of Value For Money On Public Sector Financial Management At The Regional Financial And Asset Management Agency (Bpkd)Papua Province. *Jurnal Cakrawala*, 6(3), 893–894. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/9868/6230>
- Zulkarnain. (2025). *Polda Sumsel Ikut Pemeriksaan Terinci BPK RI Semester II 2025, Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan*. Tribata News Sumsel. <https://tribatanews.sumsel.polri.go.id/main/detail/10747/Polda-Sumsel-Ikuti-Pemeriksaan-Terinci-BPK-RI-Semester-II-2025--Wujudkan-Transparansi-dan-Akuntabilitas-Keuangan?>